

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Oleh

Anna Aprilia S¹ ; Aris Tri Haryanto²; Damayanti Suhita³

Abstract

The purpose of this research was to find out the performance of KPU in Sukoharjo regency in organizing legislative elections in year of 2014. This research use descriptive-qualitative method. The research of informant use purposive sampling. Then the data source use primary and secondary data. The data collection technique use interview and documentation. In this research also using interactive analysis technique. The results of this research are: (1) In organizing the legislative election in year of 2014, the performance of KPU of Sukoharjo was good enough. We could see that they did the all of the legislative election process in compliance with the schedule, and also based of their vision and mission. (2) From the human resource aspect, KPU of Sukoharjo regency has enough member and committee of organizing the election which as Ad Hoc, they have 15.017 people of human resources. They also have the good infrastructure. (3) If from estimate aspect, the cost estimate that they got was from APBN. In its execution, KPU of Sukoharjo was efficient and effective enough. (4) KPU in collaboration with County Police (polres) and District Military Command (Kodim) until stage of KPPS together did the distribution of the logistics. They used about 7 trucks to carry the logistics. (5) The concept which was did of Sukoharjo's KPU in increasing the people participation was by electronic media that was radio, then face to face communication with the people, until did the activity or massal event. (6) The performance of KPU of Sukoharjo regency of their effort to increase the politic participation of the people in legislative elections in year of 2014 got a number of percentages as much as 75.42%.

Key Words: Performance, KPU of Sukoharjo Regency, Legislative elections.

Pendahuluan

Suatu negara yang berasas demokrasi berarti negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas demokrasi. Salah satu wujud dari adanya demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan pemimpin secara langsung. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan demokrasi, hal tersebut sudah dianggap cukup mewakili partisipasi masyarakat dan aspirasi masyarakat. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dinyatakan bahwa pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu: Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi

¹ Penulis

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Ukuran berjalannya lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan baik atau tidak telah dicantumkan dalam undang-undang penyelenggara pemilu. Baik buruknya kinerja KPU diukur dari telah dilaksanakannya aturan tugas dan wewenang yang ada dalam undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat baik itu KPU ditingkat pusat maupun KPUD di daerah-daerah. Peran lembaga KPU/KPUD ini sangat berpengaruh salah satunya dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal inilah yang menjadi tantangan KPU maupun KPUD untuk bagaimana menjalankan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Meningkatnya angka partisipasi masyarakat ini tidak lepas dari kinerja KPUD kabupaten Sukoharjo dan juga peran dari calon legislatif sendiri dalam mempromosikan agar masyarakat ikut dalam pesta demokrasi. Dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat diharapkan juga menjadi motivasi sendiri dan sebagai pendorong agar Indonesia dapat menjadi negara demokrasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis mengadakan penelitian dengan judul "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Sukoharjo".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

yang ingin dicapai oleh peneliti adalah Bagaimana kinerja KPU kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2014?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan mencari fakta, data yang tepat dan akurat juga mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan kinerja KPU dalam Pileg Kabupaten Sukoharjo tahun 2014.

Dalam penelitian ini, satuan/ unit analisis penelitiannya adalah unit analisis organisasi. Jenis data dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu informan tersebut ditarik berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Informan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya (Wiersma, 1995). Dalam pemilihan informan selama penelitian, peneliti memperoleh informasi dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Anggota-anggota dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai sumber jawaban atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Lexi J. Moleong, 2007). Dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan melihat buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, foto, notulen rapat, catatan sebagai sumber data penelitian. (Lexi J. Moleong, 2007)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis data dimulai dari menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara

yang telah ditulis kedalam catatan lapangan dan hasil dari dokumentasi. Setelah ditelaah kemudian berikutnya melakukan reduksi data yang dilakukan dengan merangkum inti pernyataan-pernyataan yang perlu dimasukkan dalam data. Langkah selanjutnya yaitu menyusun data berdasarkan satuan ke dalam kategorisasi tertentu. Langkah terakhir adalah memeriksa keabsahan data. Kemudian mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantive dengan metode tertentu (Lexi J. Moleong, 2007).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Lexi J. Moleong, 2007) pada dasarnya analisis data dilakukan berdasarkan pada penelitian lapangan, apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi, seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau lebih.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yaitu model yang memerlukan tiga komponen, yakni: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari sajian data peneliti dapat merumuskan kesimpulan akhir. Simpulan perlu diversifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembagian tugas diantara para anggota KPU dalam bentuk Divisi. Adapun didalam keanggotaan KPU Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi : Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi; Divisi Logistik, Keuangan, Perencanaan dan Badan Penyelenggara; Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga. Sesuai dengan ketentuan pasal 181 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas : 1) Subbagian Program dan Data 2) Subbagian Hukum 3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 4) Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH.MH yang mengungkapkan mengenai kinerja dari KPU kabupaten Sukoharjo: "Sudah cukup kinerja KPU itu memang standar, maksudnya standar disini karena sudah ada rambu-rambu sudah ada mekanisme untuk melaksanakannya. Seluruh tahapan sudah dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh keluar dari tahapan yang sudah ditentukan." (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Visi dan misi KPU telah dilaksanakan, karena setiap gerak langkah yang dilakukan oleh KPU berdasarkan atau berpedoman pada visi misi yang telah ditetapkan dan tidak boleh keluar dari itu. Dan semua visi misi telah tercapai, akan tetapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang masih belum tercapai maksimal karena ada patokan yang tinggi dari pusat yang harus dicapai. Sedangkan partisipasi adalah kesadaran dari pemilih." (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara dengan ketua KPU kabupaten Sukoharjo: " Untuk pelaksanaan pileg tahun 2014 sendiri di Sukoharjo punya 12 kecamatan dan 167 kelurahan. Kalau TPSnya sendiri dibagi menjadi 2.060 kalau ditotal-total jumlahnya mencapai 15.000-an orang." (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Tabel 1: Jumlah SDM dalam melaksanakan Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sukoharjo

No	SDM	Jumlah Anggota	Jenis Kelamin		Usia Rerata
			L	P	
1	KPU Sukoharjo	36	31	5	36
2	PPK	60	50	10	45
3	PPS	501	416	85	40
4	KPPS	14.420	11.968	2.452	42
JUMLAH		15.017	12.465	2.552	41

Sumber: KPUD Sukarjo, 2015

Infrastruktur

Seperti yang diungkapkan ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH.,MH: “Alat pendukung pelaksanaan pileg 2014 ini sudah menggunakan cara yang lebih modern, penggunaan scanner untuk scan formulir c1 dan lampiran yang langsung diupload kepusat. dan semua dapat dilihat oleh masyarakat melalui website. Ini demi keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Serta alat pendukung lain untuk mengunggah data dari KPU kabupaten sukoharjo ke pusat seperti komputer/laptop, modem juga telah ada dan memadai.” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016).

Tabel 2: Jumlah Infrastruktur yang digunakan dalam Pileg 2014 di kabupaten Sukoharjo

No.	Nama barang	Jumlah
1	Scanner	2 buah
2	Laptop	5 buah
3	Modem (wifi)	1 buah
4	Kendaraan operasional	6 mobil

Sumber: KPU Sukoharjo, 2015

Dana/Anggaran

Anggaran Belanja APBN yang dipergunakan untuk persiapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 untuk KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar Rp 11.472.843.000,- Realisasi Anggaran Belanja Tahapan Pemilu Legislatif hanya sebesar Rp 9.285.713.336,- atau 80,94 % dari pagu anggaran. Dalam menggunakan anggaran KPU dituntut efektif dan efisien. Selain itu juga untuk menjamin akuntabilitas KPU menggandeng pihak-pihak berwenang seperti yang diutarakan oleh ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH. MH berikut ini: “KPU dari pusat hingga daerah dituntut untuk Efektif dan Efisien dalam mengelola anggaran. Artinya pengeluaran dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukan. Selama itu tidak ada ya tidak ada, jadi tidak perlu diada-adakan. Semua harus kembali pada negara. Yang kedua, Prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran, itu dalam

pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait dalam hal ini misalnya pengadaan barang dan jasa KPU bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Karena KPU tidak memiliki tenaga keahlian yang memadai dalam segmen ini. Untuk menjamin tingkat akuntabilitasnya KPU menggandeng BPKP maupun inspektorat untuk mengaudit barang dan jasa yang ada di KPU setiap tahunnya baik ada pemilihan maupun tidak ada pemilihan.” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Process

Mengenai ketepatan waktu dan prosedur pelaksanaan berikut adalah jawaban yang diberikan ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH. MH: ”pelaksanaan pileg ini kan sudah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya ya harus sesuai dengan prosedur. Kita tidak boleh melenceng dari aturan tersebut.” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Ditambah lagi jawaban dari bapak Wartoyo, SH, MH sebagai kasubbag hukum, beliau mengatakan bahwa: ”sudah tepat waktu. Pelaksanaan pemilu legislatif ya sudah sesuai prosedur itu, KPU dituntut untuk tepat waktu dalam semua tahapan” (Wawancara, Kamis 28 Januari 2016)

Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik bekerja sama dengan Polres dan Kodim. Terkait dengan armadanya KPU juga bekerja sama dengan DPU karena menggunakan armada yang besar. Hal ini terkait dengan pengamanan karena sangat rawan akan konflik. Sehingga pengamanan juga diperketat. Terkait dengan pendistribusian logistik ketinggian bawah hingga ke KPPS, KPU bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Hal ini diutarakan oleh ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH. MH seperti berikut ini: ”Pendistribusian logistik bekerja sama dengan Polres dan Kodim. Terkait dengan armadanya KPU juga bekerja sama dengan DPU karena menggunakan armada yang besar. Hal ini terkait dengan pengamanan karena sangat rawan akan konflik. Sehingga pengamanan juga diperketat.” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Bekerjasama dengan polisi dan Kodim distribusi logistik berjalan efektif dengan menggunakan 7 armada truk dan dalam pengesetan menggunakan tenaga

sebanyak 50 orang maka lebih efisien dan ekonomis.

Sosialisasi

Menurut ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH. MH sosialisasi yang dilakukan KPU bersifat sistemik hal ini diungkapkan saat wawancara di kantor KPU kabupaten Sukoharjo. Berikut hasil wawancaranya: “Sosialisasi yang dilakukan KPU masih secara terstruktur sistemik dan masif. Selain dari pihak penyelenggara, artinya disini bukan hanya KPU tapi juga pada ppk pps yang ada, itu yang terstruktur, kemudian dari para pemangku kepentingan maksudnya seperti camat, lurah atau juga kepala desa. Yang kedua KPU juga menggandeng partai politik dan juga organisasi kemasyarakatan. kemudian kpu mensosialisasikan diluar sistem itu misalkan tata cara penggunaan hak pilih, tatacara memilih, mengenalkan calonnya, visi misinya, track record mereka untuk memudahkan masyarakat dalam memilih. Agar masyarakat juga tidak salah memilih, masyarakat juga harus tahu calonnya dan juga visi-misinya jangan sampai nanti seperti membeli kucing dalam karung seperti itu.” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Program dan bentuk sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo ada beberapa jenis. a) Sosialisasi Melalui Radio b) Sosialisasi Tatap Muka c) Pemasangan/Penyebaran Bahan Sosialisasi, Alat yang digunakan dalam proses sosialisasi yaitu: spanduk, baliho, stiker, poster dan leaflet, spesimen surat suara, Payung, Jam Dinding, Mug dan Gantungan Kunci dan terakhir kaos.

Ketua KPU kabupaten Sukoharjo Bapak Kuswanto, SH. MH mengutarakan pendapatnya tentang partisipasi memilih:”Kesadaran masyarakat dalam memilih calon wakil rakyatnya masih kurang hal ini disebabkan oleh kejenuhan dari masyarakat, ketidak percayaan pada caleg yang akan mereka pilih, elektabilitas yang cenderung buruk, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja anggota dewan juga buruk hal ini memengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih. ” (Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Sukoharjo yang dicapai sebesar 75,42% (database KPU kab.Sukoharjo). Hal ini tidak lepas dari proses sosialisasi dan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahapan pelaksanaan pileg 2014. Bapak Kuswanto, SH. MH menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sukoharjo: ”Strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaa membantu semua partai politik dalam mensosialisasikan para calegnya itu, juga memberi masukan kepada partai politik agar memilih caleg yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mumpuni agar para caleg ini memiliki nilai ditengah masyarakat.”(Wawancara, Selasa 9 Februari 2016)

Untuk lebih jelas dan lebih mudahnya, berikut adalah tabel gambaran peningkatan partisipasi masyarakat kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4: Tingkat Partisipasi Masyarakat Sukoharjo

Tingkat Partisipasi Tahun 2009		Tingkat Partisipasi Tahun 2010	Tingkat Partisipasi Tahun 2014
Pileg	Pilpres	Pemilu Bupati	Pileg
67,52%	71,60%	65,83%	75,42%

Sumber: KPUD Sukoharjo, 2015

Dari data diatas pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sukoharjo telah terlaksana dengan efisien efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelengga-raan pemilihan umum legislatif tahun 2014 kinerja KPU kabupaten Sukoharjo sudah cukup baik, dilihat dari dijalankan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 sesuai dengan jadwal. Dan kinerja KPU kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penutup

Aspek Sumber Daya Manusia KPU kabupaten Sukoharjo memiliki cukup Anggota dan panitia penyelenggara Pemilu yang bersifat Ad Hoc, sumber daya manusia yang dimiliki sebanyak 15.017orang dan

pemberdayaan dan perekrutan jumlah SDM tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Infrastruktur yang memadai dalam penyelenggaraan pemilu legislatif juga sudah baik.

Aspek anggaran. Anggaran/dana yang diperoleh KPU kabupaten Sukoharjo dari APBN. Dalam pelaksanaannya KPU kabupaten Sukoharjo sudah efisien dan efektif dilihat dari penggunaan anggaran yang tidak melebihi pagu anggaran. Akuntabilitas penggunaan anggaran KPU kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan pencatatan dan dilakukan setiap bulannya. Dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan Polres dan Kodim kabupaten Sukoharjo hingga tingkat KPPS menggunakan sebanyak 7 armada berupa truk untuk mengangkut logistik dari kotak, bilik suara hingga surat suara dan alat pendukung lainnya.

Konsep yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan sosialisasi melalui media elektronik yaitu radio, kemudian dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat, hingga kegiatan atau event massal.

Kinerja KPU kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 dapat dilihat dengan perolehan angka prosentase sebesar 75,42% yang meningkat dari pemilu sebelumnya.

Rekomendasi yang dapat disampaikan mengenai kinerja KPU kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya adalah: sosialisasi memang sudah tepat waktu, namun mengingat pemilu dilaksanakan secara berkala pendidikan politik yang berkesinambungan untuk masyarakat juga perlu, serta cara menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat disesuaikan dengan segmen atau tingkatan masyarakat yang ada agar mudah dalam memahami. Untuk penderita tuna netra lebih baik disediakan surat suara dengan menggunakan huruf *braille* begitupun juga dengan kelengkapan sosialisasinya sehingga para penyandang disabilitas tidak perlu lagi panduan dari orang lain, dan dapat meminimalisir penyalahgunaan suara.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998
- Dwiyanto. Agus, *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, UGM, 2007
- Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mahsun. Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta, 2006
- Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Roesda Karya, Bandung, 2007
- Prawirosentono. Suyadi, *Manajemen Sumberdaya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan edisi kedua*, BPF, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Tangkilisan. Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005